

Perkembangan Ekonomi Politik Global Terhadap Kebijakan Politik dan Ekonomi Indonesia

Fikri Ardiansyah¹ Era Mustika Ginting² Fildzah Darayani Mujasmara³ Armin Rahmansyah Nasution⁴

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: fikriardiansyah1903@gmail.com¹

Abstrak

Gagasan yang paling besar pengaruhnya terhadap kemajuan dan pembangunan bangsa di zaman sekarang ini adalah globalisasi. Globalisasi berdampak pada hampir setiap aspek kehidupan peradaban kita. Globalisasi melibatkan lebih dari sekedar interkoneksi perekonomian; itu juga melibatkan perubahan ruang dan waktu dalam keberadaan manusia. Dalam kerangka sistem politik dan ekonomi negara-negara berkembang, globalisasi berubah menjadi aparatus politik yang canggih. Namun, skenario industri juga mengalami ketidakpastian dan distribusi pendapatan yang semakin tidak merata di antara individu seiring dengan meningkatnya globalisasi saat ini. Artikel ini membahas topik liberalisasi keuangan dan globalisasi serta pengaruhnya terhadap Amerika Serikat sebagai komunitas global. Globalisasi juga dianggap mengeksploitasi gelombang demokrasi di beberapa sektor perekonomian. Terkait dengan keadaan sosial-moneter di Indonesia pada masa liberalisasi moneter, ketimpangan sosial-keuangan merupakan salah satu hal yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Kenyataan lainnya adalah bahwa globalisasi kini lebih bersifat lokal, seperti di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, dan bukan hanya di tingkat negara.

Kata Kunci: Globalisasi, Ekonomi Dan Politik, Ketimpangan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada titik ini, dapat dikatakan bahwa setiap negara di dunia telah mendengar dan merasakan dampak globalisasi. Jaringan dan perkembangan media komunikasi modern merupakan dua faktor yang berkontribusi terhadap proses globalisasi. Menurut Keohane dan Nye (1977), integrasi, saling ketergantungan, dan bahkan keterhubungan. Negara-negara Indonesia telah mengalami peluang dan permasalahan akibat globalisasi. Tantangan dan kemungkinan tersebut kini hadir di berbagai bidang dan memerlukan pengamatan dan respons yang matang. Kita harus mengikuti arus globalisasi. Negara-negara yang memiliki sumber daya ekonomi, sumber daya manusia, dan teknis tentu mempunyai posisi yang baik untuk menghadapi dan mengatasi persaingan yang begitu ketat. Negara-negara berkembang terpaksa bersaing dengan negara-negara industri sebagai akibat dari persaingan sengit yang menyertai globalisasi. Meskipun banyak kelemahan dan kekurangan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, negara-negara berkembang terpaksa bersaing dalam skala dunia. Munculnya institusi dan pemain baru di bidang politik dan ekonomi sangat dipengaruhi oleh globalisasi, yang ditandai dengan berkurangnya campur tangan negara dalam urusan ekonomi dan digantikan oleh kekuatan pasar.

Namun, situasi dunia juga ditandai dengan meningkatnya, meningkatnya ketimpangan pendapatan antar negara, meningkatnya prevalensi kemiskinan, degradasi lingkungan, dan dampak negatif globalisasi, seperti runtuhnya banyak perekonomian, serta tumbuhnya globalisasi. menurut perspektif neoliberal ini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kontrol atas arus keuangan internasional dan kecenderungan negara-negara kaya untuk meningkatkan

hegemoni ekonomi dan politik mereka terhadap pembangunan negara-negara dan kemiskinan. Ada anggapan bahwa globalisasi telah menyebabkan munculnya imperialisme jenis baru yang dihilangkan pada kontradiksi proses ini. Meskipun beberapa negara dapat memperoleh manfaat dari globalisasi ekonomi, banyak negara lain yang tertinggal, sehingga menambah struktur ekonomi negara mereka dan menyebabkan meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Sistem dan kebijakan ekonomi politik masyarakat Indonesia hanyalah salah satu bidang kehidupan yang mungkin terkena dampak globalisasi ekonomi dan liberalisasi ekonomi yang diakibatkannya.

Tinjauan Pustaka

Jantung Persoalan Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi

Meskipun terdapat banyak aspek dalam globalisasi, globalisasi ekonomi selalu mendominasi pertumbuhan global kontemporer. Kondisi ini muncul karena, berbeda dengan globalisasi non-ekonomi, globalisasi ekonomi mempunyai pengaruh yang nyata dan substansial terhadap proses pemerintahan nasional. Keberadaan dan fungsi organisasi keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, dan WTO tidak dapat dipisahkan dari organisasi kerja sama ekonomi dan perdagangan yang beroperasi di beberapa wilayah global. Organisasi-organisasi ini merupakan bagian integral dari struktur dan pelaku globalisasi ekonomi. Organisasi perdagangan dan keuangan internasional multilateral dan regional hanya beroperasi demi kepentingan terbaik negara anggotanya dan wilayahnya masing-masing. Seiring dengan globalisasi, kebijakan turunan lainnya—seperti deregulasi dan privatisasi—juga diperlukan untuk memastikan liberalisasi ekonomi berjalan sepenuhnya. Namun, tidak satupun dari kebijakan-kebijakan tersebut dapat diterapkan secara parsial. Dalam keadaan seperti ini, seseorang yang tidak efisien dalam menciptakan sumber daya ekonomi mungkin memandang peristiwa ini sebagai keuntungan atau bahkan peluang. Suatu negara tidak dapat lagi menerapkan kebijakan yang bersifat protektif, bahkan ketika harus mempertahankan perekonomiannya sendiri, karena perjanjian internasional tidak lagi mengamanatkan tindakan tersebut.

Sejumlah negara, termasuk Tiongkok (sekarang Tiongkok), menjadi contoh nyata kemajuan yang dicapai suatu negara yang memperoleh manfaat dari integrasinya ke dalam perdagangan internasional. Kemampuan Tiongkok untuk berhasil menciptakan visi yang jelas harus dianggap sebagai faktor kunci dalam kemajuan ekonomi negara tersebut. Sebagai anggota komunitas internasional, Indonesia telah mengambil bagian dalam beberapa perjanjian perdagangan bebas. Ada beberapa cara untuk memahami keterlibatan Indonesia dalam liberalisasi ekonomi. Pertama, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah percaya bahwa kondisi dalam negeri memberikan dasar yang kuat untuk melanjutkan daya saing global. Kedua, Indonesia berada di bawah tekanan untuk meratifikasi berbagai kerja sama di setiap tingkat baik di kancah internasional, regional, maupun bilateral. Ketiga, dampak internal akibat ketidakaktifan pemerintah dalam mendorong pengembangan diri dan kesejahteraan rakyatnya sambil berupaya meraih keuntungan melalui liberalisasi ekonomi (Yustika, 2014). Secara umum, kurangnya infrastruktur yang memadai, rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya kualitas angkatan kerja, dan kesenjangan regional yang terus-menerus menghambat kemampuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam perdagangan bebas di kawasan ASEAN. Permasalahan di wilayah Kalimantan sebagian besar terkait dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, belum berkembangnya infrastruktur jalan, terbatasnya akses antar wilayah, dan masih banyaknya wilayah yang terisolir. Kita dipaksa untuk mengambil bagian dalam globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas di kawasan ASEAN meskipun banyak kesulitan dan hambatan yang ada.

Globalisasi dan dampaknya terhadap Demokrasi

Globalisasi berdampak pada hampir setiap elemen kehidupan masyarakat, termasuk perilaku sosial, kesejahteraan, dinamika politik, dan lain sebagainya. Ada dua poin perdebatan yang berlawanan dalam pembahasan hubungan antara globalisasi dan demokrasi. Menurut pandangan pertama, globalisasi merupakan ancaman terhadap demokrasi. Pandangan kedua, sebaliknya, berpendapat bahwa globalisasi mendorong demokrasi. Bergantung pada apakah globalisasi mendorong pengembangan otonomi dan kesetaraan yang lebih besar antara masyarakat dan masyarakat dalam kehidupan bernegara, kita dapat menentukan apakah globalisasi akan dilihat sebagai pendorong atau penghambat demokrasi dalam konteks tersebut. Giddens (2000) menegaskan bahwa globalisasi melibatkan lebih dari sekadar peningkatan hubungan ekonomi; hal ini juga melibatkan perubahan geografi dan waktu dalam keberadaan manusia. Misalnya, peristiwa global—baik terkait dengan perekonomian atau tidak—memiliki dampak langsung terhadap masyarakat saat ini dengan lebih cepat dibandingkan di masa lalu, sementara tindakan individu sering kali memiliki dampak internasional. Meskipun ada kecenderungan untuk berasumsi bahwa dampak politik dan ekonomi dari globalisasi benar-benar membahayakan demokrasi, globalisasi juga dianggap mendorong gerakan demokrasi di banyak wilayah di dunia. Sistem politik-ekonomi internasional bersifat dinamis. Tidak mungkin mengisolasi negara-negara berkembang dari dampak globalisasi. Pada akhirnya, semua modifikasi ini memiliki kewenangan atas kemampuan Negara untuk menerapkan aturan. Menurut Fukuyama (2003), kapitalisme adalah akhir dari peradaban. Persaingan antara kapitalis dan sosialis telah bergeser ke kapitalis yang saling bersaing satu sama lain, dan kapitalisme akan terus menjadi ideologi dominan peradaban di masa mendatang..

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data, studi literatur dilakukan dengan menggunakan berbagai bahan referensi, antara lain buku, artikel jurnal, dokumen peraturan perundang-undangan, dan publikasi online yang terpercaya. Untuk memastikan keakuratan informasi, penulis melakukan triangulasi sumber.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Global Terhadap Politik Indonesia dan Peran Negara

Salah satu aspek kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dari dampak globalisasi yang cepat adalah politik. Meskipun manfaat politik dari globalisasi sangat berharga dalam penyelenggaraan urusan negara, namun dampak negatifnya dapat membahayakan kemampuan suatu negara untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, apa dampak globalisasi terhadap politik Indonesia? Independensi media massa dan politik seringkali dikaitkan dengan dampak baik globalisasi di bidang politik. Hal ini tentunya mempunyai pengaruh yang baik terhadap bagaimana sistem politik suatu negara terbentuk. Munculnya sistem pemerintahan demokratis, dimana warga negara memiliki kemampuan untuk terlibat dan membentuk kebijakan politik, juga dipicu oleh hadirnya globalisasi di bidang politik. Di sisi lain, memiliki sistem yang bebas dan demokratis terkadang dapat merugikan. Penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat dapat mengakibatkan gejolak politik dan masuknya gagasan asing non-Pancasila. Disintegrasi dan hilangnya identitas nasional merupakan kemungkinan akibat dari perselisihan sosial dan politik serta masuknya ide-ide asing. Keutuhan NKRI tentu akan terkena dampak negatif dan destruktif dari kebebasan berpolitik yang berlebihan dan tidak berlandaskan budaya politik Indonesia.

Salah satu permasalahan yang kami hadapi sehubungan dengan peran negara dan kondisi sosio-ekonomi Indonesia selama liberalisasi ekonomi adalah tingginya kesenjangan sosio-ekonomi yang terus terjadi, yang ditandai dengan kesenjangan kekayaan yang besar, kepemilikan aset yang tidak merata, dan pengelolaan lahan yang tidak merata. Data BPS menyebutkan, pada awal Maret 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Gini Ratio perlu diwaspadai karena ada kaitannya dengan kesenjangan sosial di masyarakat. Berdasarkan Rasio Gini, tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat Indonesia adalah sebesar 0,388 pada bulan Maret 2023. Dibandingkan dengan Rasio Gini pada bulan September 2022 sebesar 0,381, statistik ini mengalami peningkatan sebesar 0,007 poin, sedangkan jika dibandingkan dengan Rasio Gini pada bulan Maret 2022 sebesar 0,384, telah meningkat sebesar 0,004 poin. Dengan nilai yang dilaporkan sebesar 0,409 pada bulan Maret 2023, Rasio Gini perkotaan menunjukkan peningkatan dari 0,402 pada bulan September 2022 dan menurun dari 0,314 pada bulan Maret 2022. Berbeda dengan bulan September 2022 yang dilaporkan sebesar 0,314, Rasio Gini wilayah pedesaan pada bulan Maret 2023 sebesar 0,313.

Bahkan dengan pembangunan ekonomi yang relatif kuat, kesenjangan masih tetap ada dan menyebabkan kesenjangan semakin besar. Selain itu, menurut Oxfam dan INFID, total kekayaan empat orang terkaya di Indonesia setara dengan 100 juta warga negara termiskin. Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh organisasi keuangan Swiss Credit Suisse, 49,3% kekayaan negara dikuasai oleh 1% orang terkaya di Indonesia, sehingga menempatkan negara ini dalam kelompok negara yang masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara kelompok kaya dan miskin. UUD 1945 menjabarkan konsep-konsep ekonomi secara eksplisit dan mengharuskan prinsip-prinsip ini diikuti ketika membuat kebijakan ekonomi nasional. Pasal 33 UUD 1945 Menurut UUD:

1. Perekonomian diselenggarakan sebagai suatu usaha koperasi yang berdasarkan atas dasar kekeluargaan.
2. Negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negaranya dan mempengaruhi sarana penghidupan banyak orang.
3. Negara mengatur tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dan mempergunakannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Cita-cita kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional menjadi landasan demokrasi ekonomi yang mendasari penyelenggaraan perekonomian nasional.
5. Undang-undang memuat peraturan tambahan mengenai penerapan ayat ini.

Politik Indonesia dan posisi bangsa di kancah dunia sangat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian dunia. Karena ketergantungannya pada perdagangan luar negeri, Indonesia rentan terhadap perubahan perekonomian dunia. Perkembangan ekonomi global yang kuat biasanya disertai dengan peningkatan ekspor dan investasi asing ke Indonesia. Di sisi lain, Indonesia dapat mengalami penurunan ekspor dan investasi asing selama resesi global. Kondisi perekonomian global berpotensi mempengaruhi tindakan pemerintah Indonesia dalam kerangka politik. Untuk mengatasi dampak perubahan perekonomian global, pemerintah mungkin perlu mengubah kebijakan moneter dan fiskalnya. Selain itu, untuk meningkatkan posisi perekonomian Indonesia di pasar dunia, pemerintah dapat melakukan diskusi mengenai perdagangan internasional dan kolaborasi ekonomi dengan negara lain. Hal lain yang juga penting dalam mengatasi dampak ekonomi global adalah partisipasi negara. Untuk menjaga kepentingan perekonomian negara, pemerintah Indonesia harus mampu mengelola kebijakan perekonomian dengan baik. Pengelolaan utang luar negeri, perdagangan, investasi, dan kebijakan fiskal semuanya termasuk di dalamnya.

KESIMPULAN

Globalisasi ekonomi adalah proses di mana perdagangan dan aktivitas ekonomi mengubah semua negara menjadi satu kekuatan pasar yang lebih saling berhubungan dan melampaui batas-batas negara. Globalisasi ekonomi mengakibatkan kaburnya batas-batas negara dan semakin kuatnya hubungan antara perekonomian domestik dan perekonomian negara lain. Globalisasi perekonomian akan memberikan peluang bagi barang-barang global dan lokal untuk memasuki pasar. Di satu sisi akan menciptakan pasar produk dalam negeri yang kompetitif di pasar luar negeri. Kesiapan Indonesia menghadapi tantangan globalisasi akan sangat dipengaruhi oleh interaksi ekonomi-politik global pada umumnya dan hubungan ekonomi-politik antara Indonesia dan dunia pada khususnya. Ada dinamisme dalam struktur politik-ekonomi dunia saat ini. Tidak mungkin mengisolasi negara-negara berkembang dari dampak globalisasi. Negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam ekonomi politik internasional akibat dampak globalisasi terhadap banyak negara. Pemain-pemain baru yang bersembunyi di balik perusahaan-perusahaan global, lembaga-lembaga internasional, dan negara-negara yang mendukung gagasan sistem terbuka telah mengambil posisi. Globalisasi bukanlah suatu negara, meskipun kadang-kadang didefinisikan dengan berkurangnya keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi dan digantikan oleh kekuatan pasar. Untuk memastikan bahwa proses pasar dan kegiatan ekonomi dapat berfungsi secara sehat dan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, keterlibatan negara dalam perekonomian sangatlah penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Giddens. 2000. Jalan Ketiga dan Kritik-Kritiknya. Polity Press
BPS Gini Ratio Maret 2023 tercatat sebesar 0,388
Fukuyama, Francis. 2003. The End of History and Last Man. Yogyakarta. Qalam
Jumadi, 2017, Kebijakan Politik Ekonomi Indonesia, Tanjungpura
Jumadi, 2017, Perkembangan Ekonomi Global, Tanjungpura
Undang-Undang Dasar 1945
Waspo TS, Suhanadji. 2004. Modernisasi dan Globalisasi studi pembangunan Dalam
Prespektif Global. Penerbit Insan Cendekia
Winarno, Budi. 2012. Jurnal, Globalisasi dan Masa Depan Demokrasi, Yogyakarta
Wrihatnolo, Rendy R dan Riant Nugroho. Jurnal 2011. Demokrasi Bagi Negara Negara